



RENCANA KERJA TAHUN 2023

PEMERINTAH KOTA BATAM

BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

10. Peraturan. . .

10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 1);
12. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 942);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM TAHUN 2023.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II. . .

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB V : PENUTUP
- (3) Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan bagian dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD);
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2023; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

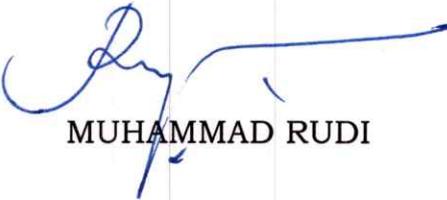
Agar . . .

-5-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 29 Juli 2022

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 960

BAB V PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2023 baik dalam lingkup program maupun kegiatan serta sub kegiatan;
- b. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk;
- c. Melaksanakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
- d. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- e. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023; dan
- f. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya untuk arah yang lebih baik lagi.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi *stake holder* yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya.

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI



PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 462217, 461046 Fax. (0778) 461046
B A T A M

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KOTA BATAM

NOMOR : 72/KU.00.00/XII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KOTA BATAM
TAHUN 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan program dan kegiatan pada tahun 2023, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam Tahun 2023;
- b. bahwa dalam melaksanakan maksud sebagaimana pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam Tahun 2023 yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam;
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah

Kota Batam Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 50);

5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021 – 2026;
6. Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam Periode Tahun 2021 – 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam dengan susunan personil sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu RPJMD Kota Batam Tahun 2021 – 2026 dan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam Tahun 2021 – 2026
- .
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam yang terkait dengan Tim dimaksud.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 28 Desember 2021

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM KOTA BATAM**



Dra. HASNAH

Pembina Utama Muda

NIP 19680714 198909 2 001

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam
Nomor : 72/KU.00.00/XII/2021
Tanggal : 28 Desember 2021

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KOTA BATAM**

NO	NAMA / JABATAN	KETERANGAN
1	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Ketua
3	Kabid. Pembinaan, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur	Anggota
4	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Fasilitasi	Anggota
5	Kabid. Mutasi, Kepangkatan dan Promosi	Anggota
6	Kabid. Pengembangan Aparatur	Anggota
7	Kasubbag. Perencanaan Program	Anggota
8	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
9	Pengelola Program dan Kegiatan	Anggota

Ditetapkan di B A T A M
Pada Tanggal : 28 Desember 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM KOTA BATAM



Dra. HASNAH
Pembina Utama Muda
NIP 19680714 198909 2 001



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karuniaNya kita dapat menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam Tahun 2023.

Dalam rangka mengemban amanah misi ke-5 dari Pemerintah Kota Batam dan untuk mempermudah pelaksanaan kinerja pada tahun 2023, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023. Rencana Kerja tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam tahun 2021 – 2026.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2023 ini, maka diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam selama tahun 2023 dan kiranya dapat memberikan manfaat baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.

Batam, 22 Juli 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM KOTA BATAM



Dra. HASNAH

Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19680714 198909 2 001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
PENDAHULUAN.....	1
BAB I 1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum	6
1.3.Maksud dan Tujuan.....	9
1.4.Sistematika Penulisan.....	10
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	11
BAB II 2.1.Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BKPSDM Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis BKPSDM.....	11
2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	29
2.4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	31
2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	41
BAB III 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	41
3.2.Tema, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kota Batam dalam RKPD Tahun 2023.....	43
3.3.Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.	44
3.4.Program dan Kegiatan	45
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	62
BAB IV 4.1 .Rencana Kerja dan Pendanaan.....	62
4.2.Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Kota Batam.....	80
4.3.Prioritas Perangkat Daerah.....	80
PENUTUP.....	83
BAB V 5.1.Kaidah Pelaksanaan.....	83
5.2.Rencana Tindak Lanjut.....	84



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam.....	13
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam.....	27
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kota Batam.....	33
Tabel T-C32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kota Batam Tahun 2023.....	40
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam.....	55
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2023.....	63
Tabel 4.2	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2023.....	74
Tabel 4.3	Prioritas Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2023.....	81



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Undang-undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi:

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun;
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 2 menyatakan “ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas : RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah”.

Pemerintah Kota Batam pada tahun 2020 telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara serentak di beberapa wilayah Republik Indonesia. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka Walikota dan Wakil Walikota menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD



merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sejalan dengan penyusunan RPJMD, Perangkat Daerah juga menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yang disebut dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini mengacu pada RPJMD. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Dengan tugas tersebut, maka Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2021-2026 perlu memperhatikan beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), antara lain: menciptakan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat; menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara berdasarkan pada kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dalam proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan; serta mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi, yaitu Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam



sebagai salah satu Perangkat Daerah setelah menyusun Renstra maka perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dalam hal ini Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2023. Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2023 mengacu pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2021-2026, Visi, Misi Walikota dan Wakil Walikota Batam terpilih hasil Pilkada tahun 2020 melalui prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah sebelum dokumen Rencana Kerja (Renja) ditetapkan. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam. Pada Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berkedudukan sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pendidikan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam mempunyai fungsi sebagai :



- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengadaan, pemberhentian, informasi dan fasilitasi, bidang mutasi, kepangkatan dan promosi, bidang pembinaan, penilaian kinerja dan penghargaan aparatur dan bidang pengembangan aparatur;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengadaan, pemberhentian, informasi dan fasilitasi, bidang mutasi, kepangkatan dan promosi, bidang pembinaan, penilaian kinerja dan penghargaan aparatur dan bidang pengembangan aparatur;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan bidang pengadaan, pemberhentian, informasi dan fasilitasi, bidang mutasi, kepangkatan dan promosi, bidang pembinaan, penilaian kinerja dan penghargaan aparatur dan bidang pengembangan aparatur;
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal melalui program-program yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Batam, sehingga dapat menyusun target kerja yang akan dicapai dan memudahkan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam dalam mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja yang telah dihasilkan pada tahun sebelumnya dan mentargetkan capaian kinerja selanjutnya.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah atau bisa disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Selain pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Renja Perangkat Daerah diatur juga pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Adapun tahapan dan tatacara penyusunan Renja Perangkat Daerah, sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, tahap



- persiapan ini meliputi beberapa hal, yaitu;
- a. Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan agenda kerja;
 - d. Pengumpulan data dan informasi.
2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, terdiri dari ;
- a. Tahap Perumusan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
 - b. Tahap penyajian Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
3. Pelaksanaan Forum OPD, Forum OPD merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (*stake holder*), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah. Hal ini menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi.
4. Penetapan Renja Perangkat Daerah, Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.
- 1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.
- Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam juga mengikuti point-point penting yang terdapat pada RKPD Kota Batam. Penetapan prioritas berorientasi pada

memenuhi hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan serta berkelanjutan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan erat dengan RKPD, RPJMD dan juga memperhatikan RPJPD. Upaya untuk mensinergikan program dan kegiatan di tahun 2023 diantaranya melalui inventarisasi data, permasalahan dan potensi yang ada. Selain itu juga adanya usulan-usulan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat pada saat pelaksanaan Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, maupun usulan Perangkat Daerah terkait melalui Forum OPD yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pembangunan Daerah Kota Batam, seperti dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1.1.

Keterkaitan Tahap Penyusunan RKPD dan Renja SKPD

1.2. Landasan Hukum.

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2023 sebagai berikut :

1.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah.



Peraturan perundang-undangan terkait dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Kewenangan Perangkat Daerah, meliputi ;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran.

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi



- Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
 7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025;
 8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 ;
 9. Peraturan Walikota Batam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026;
 10. Peraturan Walikota Batam Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023.
- 1.2.3. Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Lainnya terkait Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam.
- Peraturan perundang-undangan yang terkait Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran adalah sebagai berikut :
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);



2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.3.1. Maksud.

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2023 yaitu:

- a. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dan pedoman bagi sekretariat dan bidang di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam dalam melaksanakan rencana kegiatan tahunan dalam jangka 1 (satu) tahun 2023;
- b. Menyiapkan dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Pemerintah Kota Batam.

1.3.2. Tujuan.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2023 yaitu:

- a. Menselaraskan pelaksanaan kegiatan sekretariat dan bidang di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan



Sumber Daya Manusia Kota Batam sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- b. Menentukan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dalam 1 (satu) tahun perencanaan;
- c. Adanya kesinambungan antara RPJMD, Rentrsa Perangkat Daerah dan Renja untuk menunjang pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
Bab II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BKPSDM Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis BKPSDM
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bab III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2 Tema, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Batam Dalam RKPD Tahun 2023
	3.3 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
	3.4 Program dan Kegiatan
Bab IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Bab V	PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BKPSDM Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis BKPSDM.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2021 juga dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2021 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program kegiatan, pelaksanaan rencana program kegiatan, dan hasil rencana program kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2023, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut:

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2023 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 sebagai dasar awal dalam penyusunan perencanaan tahun 2023;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program kegiatan tahun berikutnya dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan organisasi.

Pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam dengan capaian realisasi fisik sampai dengan akhir bulan Nopember tahun anggaran 2021 mencapai 91,23 % dan capaian realisasi keuangan sebesar



Rp.9.844.778.668,00 atau sebesar (79,12%) dari total pagu anggaran **Rp. 12.443.615.790,00** yang terdiri dari 3 program, 9 kegiatan dan 19 sub kegiatan.

Berikut adalah rekapitulasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam serta pencapaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2021 menurut indikator program dapat dilihat dalam table T-C.29 sebagai berikut :



Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5										
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	03									
	BIDANG URUSAN : KEPEGAWAIAN									
5	03	01						100,00%	100,00%	100,00%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00%					100,00%	100,00%	100,00%
5	03	01	2.02					100,00%	100,00%	100,00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100,00%					100,00%	100,00%	100,00%
5	03	01	2.05					0,00%	0,00%	0,00%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana	100,00%					0,00%	0,00%	0,00%
5	03	01	2.06					100,00%	100,00%	100,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%					100,00%	100,00%	100,00%



Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Yang Diadakan	100,00%					100,00%	100,00%	100,00%
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100,00%					100,00%	100,00%	100,00%
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	100,00%					100,00%	100,00%	100%
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH (1)	Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN	93,15%					90,75%	90,75%	97,00%
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ASN Yang Telah Memutakhirkan Data Kepegawaian	89,50%					85,50%	85,50%	96,00%
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan Kompetensinya	96,80%					96,00%	96,00%	99,17%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH (2)	Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti	100,00%					100,00%	100,00%	100,00%
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN Yang Memenuhi Penilaian Kinerja	5.500 orang					5.500 orang	5.557 orang	101,04%
		Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Diselesaikan	82,33%					76,33%	76,33%	92,71%
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH (3)	Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan DIV/S1 Ke Atas	73,17%					72,62%	72,62%	99,25%
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN Berkualifikasi D-IV/S1	3.832 orang					3.812 orang	3.812 orang	99,48%
		Jumlah ASN Berkualifikasi S-2	397 orang					385 orang	385 orang	96,98%
		Jumlah ASN Yang Memenuhi Kompetensi	3.252 orang					2.636 orang	2.636 orang	81,06%



Dari tabel **Tabel T-C.29** dapat dijelaskan hasil pelaksanaan Program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2021 menurut indikator program yang telah mengalami rasionalisasi/refocusing anggaran, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Program ini terdiri dari 5 kegiatan dengan target kinerja s/d 30 Nopember 2021 adalah sebesar 99,84% dan baru terealisasi sebesar 92,13%, sehingga terjadi deviasi sebesar 7,71%.

Hal ini dapat dijelaskan terhadap pencapaian kinerja kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 91,93% dari target kinerja sebesar 99,96%, sehingga terjadi deviasi sebesar 8,03%.

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan :

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Pegawai. Semula anggaran kegiatan ini pada APBD murni sebesar Rp. 37.500.000,00 dianggarkan untuk pengadaan mesin/kartu absensi sebanyak 6 buah, namun pada perubahan APBD telah mengalami rasionalisasi anggaran karena absensi kehadiran pegawai telah menggunakan presensi online.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Capaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 97,31% dari target sebesar 99,81%. Sehingga terjadi deviasi sebesar 2,51%. Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;



- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Capaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 90,36% dari target sebesar 92,74%. Sehingga terjadi deviasi sebesar 2,37%.

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Capaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 85,93% dari target sebesar 96,16%. Sehingga terjadi deviasi sebesar 10,22%.

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan target kinerja s/d 30 Nopember 2021 adalah sebesar 94,25% dan baru terealisasi sebesar 80,39%, sehingga terjadi deviasi sebesar 13,86%.

Hal ini dapat dijelaskan terhadap pencapaian kinerja kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

Capaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 80,39% dari target sebesar 94,25%. Sehingga terjadi deviasi sebesar 13,86%.



Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Adapun untuk kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yaitu pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN dengan capaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%.

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

- Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN.
- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN.

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

1. Program Kepegawaian Daerah.

Program ini terdiri dari 3 kegiatan dengan target kinerja s/d 30 Nopember 2021 adalah sebesar 56,25% dan sudah terealisasi sebesar 93,00%, sehingga melebihi target kinerja sebesar 36,75%.

Hal ini dapat dijelaskan terhadap pencapaian kinerja kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN.

Capaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 89,18% dari target sebesar 20,76%. Sehingga melebihi target sebesar 68,41%.

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN.

b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN.

Capaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 50,00% dari target sebesar 100,00%. Sehingga terjadi deviasi sebesar 50,00%.

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

- Pengelolaan Mutasi ASN.



c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN.

Capaian kinerja kegiatan ini adalah sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%.

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

- Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN.
- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN.

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Untuk kegiatan yang pencapaian realisasi fisik mencapai 100% pada umumnya tidak memiliki kendala permasalahan yang berarti, akan tetapi untuk yang pencapaian realisasi fisik tidak mencapai 100% pada tahun ini disebabkan adanya faktor Pandemi Covid-19 yang telah melanda dunia yang berakibat telah dilakukan Refocusing/Rasionalisasi anggaran sehingga banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan. Namun hal tersebut harus tetap menjadi evaluasi bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam dalam menganggarkan dan melaksanakan kegiatan. Untuk pencapaian target realisasi fisik dan keuangan yang maksimal, diperlukan acuan dalam menjalankan kegiatan, yaitu Kerangka Acuan Kerja (KAK). Sehingga dalam menjalankan kegiatan masing-masing pelaksana kegiatan menjalankan kegiatannya sesuai dengan acuan yang ada pada Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Permasalahan umum dari semua kegiatan yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam adalah sebagai berikut:

- 1) Sampai dengan saat ini, pemenuhan kebutuhan pegawai untuk masing-masing OPD masih kurang dikarenakan adanya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Pemerintah Kota Batam.
- 2) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Hal ini merupakan efek dari kekurangan Pegawai dan berakibat kepada penempatan pegawai yang belum proporsional dan belum dapat sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan analisis jabatan. Sehingga masih dirasakan beberapa kelemahan baik segi penempatannya maupun pemerataan penempatan pegawai.



- 3) Perlu adanya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi tentang pelaksanaan diklat, workshop, bimbingan teknis maupun kursus-kursus yang telah dilaksanakan sehingga pencapaian manfaatnya bisa maksimal dimasa yang akan datang.

e. Implikasi yang timbul terhadap pencapaian program Renstra perangkat daerah.

Implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam.

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut.

Untuk kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :

- 1) Melakukan perubahan terhadap target program dan kegiatan pada perjanjian kinerja.
- 2) Melakukan review/telaahan ulang terhadap target program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra.
- 3) Merencanakan target fisik dan keuangan yang seimbang agar pencapaiannya maksimal.

Perkiraan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan (tahun 2022).

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia Kota Batam dengan capaian realisasi fisik sampai dengan akhir bulan Juni 2022 mencapai 39,11% dan realisasi keuangan sebesar Rp6.371.334.129 atau sebesar 33,75% yang terdiri dari 3 Program 11 Kegiatan 25 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi program/kegiatan yang sedang berjalan sampai dengan bulan Juni 2022 yang direncanakan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Program ini terdiri dari 5 kegiatan dengan target kinerja sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar 95,38% dan baru



terrealisasi sebesar 66,19%. Hal ini dapat dijelaskan terhadap pencapaian kinerja kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 sebesar 35,54% dari target kinerja sebesar 100%.
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
- 2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar 30,56% dari target sebesar 100%.
Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 3) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang.
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar 0% dari target sebesar 100%.
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar 47,64% dari target sebesar 100%.
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang.
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar 41,44% dari target sebesar 100%.



Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Kepegawaian Daerah.

Program ini terdiri dari 4 kegiatan dengan target kinerja sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar 50% dan baru terealisasi sebesar 100%. Hal ini dapat dijelaskan terhadap pencapaian kinerja kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN.

Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar 7,96% dari target sebesar 97,93%.

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN.
- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian.

2) Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN.

Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar 23,78% dari target sebesar 92,57%.

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :

- Pengelolaan Mutasi ASN.
- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN.
- Pengelolaan Promosi ASN.

3) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN.

Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar 37,74% dari target sebesar 89,51%.

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN.



4) Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar 8,75% dari target sebesar 100%.

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :

- Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
- Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai.
- Pembinaan Disiplin ASN.

3. Program Kepegawaian Daerah.

Program ini terdiri dari 2 kegiatan dengan target kinerja sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar 56,20% dan baru terealisasi sebesar 67,30%. Hal ini dapat dijelaskan terhadap pencapaian kinerja kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis.

Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar 15,58% dari target sebesar 61.97%.

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.

2) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar 38,03% dari target sebesar 61.97%.

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan SPM



untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Namun pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia belum mempunyai dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi aspek tingkat capaian kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam. Pada Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam berkedudukan sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengadaan, pemberhentian, informasi dan fasilitasi, bidang mutasi, kepangkatan dan promosi, bidang pembinaan, penilaian kinerja dan penghargaan aparatur dan bidang pengembangan aparatur;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengadaan, pemberhentian, informasi dan fasilitasi, bidang mutasi, kepangkatan dan promosi, bidang pembinaan, penilaian kinerja dan penghargaan aparatur dan bidang pengembangan aparatur;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan bidang pengadaan, pemberhentian, informasi dan fasilitasi, bidang mutasi, kepangkatan dan promosi, bidang pembinaan, penilaian kinerja dan penghargaan aparatur dan bidang pengembangan aparatur;
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.



Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tersebut di atas maka Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN);
- 2) Persentase Penyelesaian Pelayanan Informasi Kepegawaian;
- 3) Persentase Peningkatan Kinerja dan Disiplin ASN;
- 4) Persentase ASN yang Memenuhi Kualifikasi dan Kompetensi.



Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kota Batam

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n +1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n +1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	92,13%	-	100,00%	100,00%	-
2	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	91,93%	-	100,00%	100,00%	-
3	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	-	100,00%	100,00%	-
4	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	97,31%	-	100,00%	100,00%	-
5	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	-	100,00%	100,00%	-
6	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90,36%	-	100,00%	100,00%	-
7	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	85,93%	-	100,00%	100,00%	-
8	Persentase Pemutakhiran Data ASN dan Data Penempatan ASN	-	-	90,15%	90,75%	91,35%	91,95%	89,73%	-	91,35%	91,95%	-
9	Persentase ASN Yang Telah Memutakhirkan Data Kepegawaian	-	-	84,50%	85,50%	86,50%	87,50%	83,62%	-	86,50%	87,50%	-
10	Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan Kompetensinya	-	-	95,80%	96,00%	96,20%	96,40%	95,84%	-	96,20%	96,40%	-



No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n +1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n +1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	-
12	Jumlah ASN Yang Memenuhi Penilaian Kinerja	-	-	5.500 orang	5.500 orang	5.500 orang	5.500 orang	5.615 orang	-	5.500 orang	5.500 orang	-
13	Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Diselesaikan	-	-	74,83%	76,33%	77,83%	79,33%	83,33%	-	77,83%	79,33%	-
14	Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan D-IV/S-1 Ke Atas	-	-	72,48%	72,62%	72,76%	72,90%	73,02%	-	72,76%	72,90%	-
15	Jumlah ASN Berkualifikasi D-IV/S-1	-	-	3.807 orang	3.812 orang	3.817 orang	3.822 orang	3.742 orang	-	3.817 orang	3.822 orang	-
16	Jumlah ASN Berkualifikasi S-2	-	-	382 orang	385 orang	388 orang	391 orang	394 orang	-	388 orang	391 orang	-
17	Jumlah ASN yang Memenuhi Kompetensi	-	-	2.582 orang	2.636 orang	2.790 orang	2.944 orang	2.444 orang	-	2.790 orang	2.944 orang	-
18	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	-	-	60,70%	61,97%	65,59%	69,21%	58,65%	-	65,59%	69,21%	-
19	Persentase ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis Dan Fungsional	-	-	10,00%	11,00%	12,00%	13,00%	22,61%	-	12,00%	13,00%	-
20	Persentase ASN Yang Memenuhi Syarat Kualifikasi Jabatan	-	-	44,61%	45,03%	49,66%	54,28%	40,23%	-	49,66%	54,28%	-
21	Persentase Pemenuhan Diklatsar CPNS	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	-



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Tingkat Kinerja Perangkat daerah.

Faktor-faktor pendorong bagi tercapainya kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, adalah sebagai berikut:

- a. Adanya peluang pengisian formasi yang kurang melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- b. Perkembangan teknologi informasi yang mendukung peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- c. Proses rekrutmen pegawai yang terbuka dan transparan telah menggunakan CAT;
- d. Penilaian kemampuan ASN melalui *assessment*;
- e. Adanya kesempatan bagi ASN untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui kebijakan tugas belajar, ijin belajar dan kediklatan.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan.

Faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan hambatan dalam pelayanan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, adalah:

- a. Kebutuhan pegawai semakin meningkat sementara formasi kebutuhan yang diusulkan sekitar 30% yang disetujui oleh Pemerintah Pusat dan banyaknya pegawai yang pension setiap tahun;
- b. Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang ASN belum keluar sehingga pengambilan keputusan berkaitan kepegawaian masih berupa kebijakan dan belum memiliki dasar hukum;
- c. Adanya kebijakan daerah yang terkadang kurang selaras dengan kebijakan penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit;
- d. Pengalokasian anggaran untuk Diklat pegawai sangat terbatas;
- e. Penempatan ASN belum optimal, belum sesuai kompetensi dan kualifikasi jabatan;



- f. Kurangnya kedisiplinan ASN ditandai tingginya kasus pelanggaran disiplin disebabkan pemahaman ASN terhadap aturan kepegawaian yang masih kurang;
- g. Rendahnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian kepada Aparatur Sipil Negara Kota Batam.

2.3.3. Peluang dan Tantangan.

Adapun Peluang dalam peningkatan kinerja pada BKPSDM Kota Batam adalah sebagai berikut :

- a. Pemberlakuan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan kapasitas aparatur sipil negara;
- d. Kemajuan teknologi informasi atau elektronik *e-government* (*e.gov*) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun Tantangan dalam peningkatan kinerja pada BKPSDM Kota Batam adalah sebagai berikut :

- a. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean governance*);
- b. Formasi pegawai negeri sipil yang masih sentralistik;
- c. Penerapan Prinsip *Spoil System* Dalam Pembinaan Pegawai; Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

2.3.4. Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan di atas, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam mencoba beberapa strategi yang diharapkan dapat meminimalkan permasalahan yang ada. Adapun upaya pemecahan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan, menjaga, memupuk rasa kebersamaan, loyalitas antar sesama pegawai dan mengoptimalkan potensi pegawai yang relatif berusia muda untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Kota Batam;
- b. Memanfaatkan akses yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batam dalam mengembangkan Sumber Daya Aparatur;
- c. Menciptakan Sumber Daya Aparatur yang handal melalui Diklat yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Pemerintah Kota Batam;



- d. Meningkatkan kemitraan antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan lembaga Diklat baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun pihak swasta dalam rangka meningkatkan SDM Pegawai Pemerintah Kota Batam;
- e. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang professional;
- f. Mengadakan koordinasi dengan unit kerja lainnya dalam pembinaan Sumber Daya Aparatur;
- g. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas PNS Pemerintah Kota Batam sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengikuti perkembangan informasi yang begitu cepat;
- h. Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Batam;
- i. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan PNS dengan melakukan pengiriman Tugas Belajar/Ijin Belajar guna mengikuti jenjang pendidikan formal dan structural;
- j. Melaksanakan pembinaan kepegawaian dengan melaksanakan kegiatan evaluasi kedisiplinan dan memberikan penghargaan kepada pegawai apabila telah menunjukkan kesetiaan, jasa atau telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya;
- k. Mengupayakan penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya melalui analisa jabatan dalam rangka pengembangan semangat kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan produktifitas kerja.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Sebagaimana beberapa program dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang telah direncanakan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam tahun 2023, diperlukan tindakan lanjutan program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja BKPSDM Kota Batam tahun 2023.

Dalam perumusan Rancangan Awal Rencana Kerja BKPSDM Kota Batam tahun 2023 menjadi Rencana Kerja



BKPSDM Kota Batam tahun 2023, dibutuhkan penyesuaian rencana kerja melalui pertimbangan analisa kebutuhan program dan kegiatan serta anggaran yang tersedia dalam menjalankan program dan kegiatan tersebut.

Perubahan dan penyesuaian terjadi pada sebagian program teknis, baik rincian kegiatan, nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran pada masing-masing program dan kegiatan. Dinamika perubahan dan kebutuhan yang terjadi di lapangan menjadi alasan pertimbangan terhadap perubahan dan penyesuaian Rencana Kerja BKPSDM Kota Batam tahun 2023. Demikian halnya dengan penetapan anggaran serta target capaian kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan telah disesuaikan. Untuk lebih jelasnya mengenai review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 dapat dilihat pada **tabel T-C.31** berikut:



Tabel T-C.31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Batam	Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	13.859.144.085	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Batam	Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	14,115,567,463	-
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100,00%	11.514.661.515	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100,00%	12,452,100,731	-
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah PNS BKPSDM Kota Batam yang menerima gaji dan tunjangan	52 orang	11.484.933.515	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 orang	12,399,960,731	-
b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	Jumlah pelaksana penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	2 orang	29.728.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	52,140,000	-
			Jumlah belanja materai	1000 lembar							
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana	100,00%	399.625.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana	100,00%	39,325,000	-
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	55 stel	49.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	39,325,000	-

Rencana Kerja Tahun 2023



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Batam	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20 orang	225.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 orang	0	-
c	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Batam	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	125.125.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Batam	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 orang	0	-
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	1.032.638.570	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	629,267,700	-
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	6.081.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.490.000	-
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48 jenis	193.490.570	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	184.462.700	-
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Batam	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10 jenis	90.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0	-
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 jenis	5.998.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	6,573,000	-
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8 jenis	66.869.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	58,554,000	-
f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 jenis	7.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	7.200.000	-
g	Penyediaan Bahan/Material	Kota Batam	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	5 jenis	100.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0	-
h	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Batam	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	200 orang	45.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Batam	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	9.000.000	-

Rencana Kerja Tahun 2023



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
i	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 kali	518.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	359.988.000	-
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	100,00%	580.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	100,00%	679.088.000	-
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	18 jenis	580.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	66 Unit	679.088.000	-
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	98.099.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	98.099.000	-
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Batam	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Kg	10.800.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.800.000	-
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 orang	87.299.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	86,246,032	-
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	100,00%	234.120.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	100,00%	218,740,000	-
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 unit	39.780.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	39.780.000	-

Rencana Kerja Tahun 2023



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	4 unit	140.100.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	140.100.000	-
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	75 unit	54.240.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	57 unit	38,860,000	
II.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH (1)	Kota Batam	Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN	91,35%	2.106.847.000	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH (1)	Kota Batam	Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN	91,35%	2,305,182,000	-
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Batam	Persentase ASN Yang Telah Memutakhirkan Data Kepegawaian	86,50%	1.347.062.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Batam	Persentase ASN Yang Telah Memutakhirkan Data Kepegawaian	86,50%	930,025,000	-
a	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Batam	Jumlah pengadaan CPNS Pemerintah Kota Batam Jumlah pengadaan PPPK Pemerintah Kota Batam	400 orang 1000 orang	994.711.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	10 Dokumen	793,106,000	-
b	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Batam	Jumlah laporan koordinasi pengadaan PNS dan PPPK	1 laporan	70,000,000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Batam	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	15 Dokumen	0	-
c	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Batam	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	1 laporan	35.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	116 Dokumen	0	-
d	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kota Batam	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	9 lembaga	115.000.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kota Batam	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	9 lembaga	0	-



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
e	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Batam	Jumlah aplikasi yang dikelola (SIMPEG)	1 Aplikasi SIMPEG	132.351.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	136,919,000	-
2	Mutasi dan Promosi ASN	Kota Batam	Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan Kompetensinya	96,20%	759.785.000	Mutasi dan Promosi ASN	Kota Batam	Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan Kompetensinya	96,20%	643,006,000	-
a	Pengelolaan Mutasi ASN	Kota Batam	Jumlah kelompok mutasi ASN yang dikelola	3 Kelompok (JPT, Administrasi, dan Fungsional)	73.340.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	46,360,000	-
b	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Batam	Jumlah ASN yang naik pangkat	900 orang	150.875.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Batam	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	149,993,000	-
			Jumlah ASN yang mengikuti ujian dinas/penyesuaian ijazah	200 orang							
c	Pengelolaan Promosi ASN	Kota Batam	Jumlah promosi jabatan ASN yang akan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	10 JPT	535.570.000	Pengelolaan Promosi ASN	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	446,653,000	-
III.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH (2)	Kota Batam	Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti	100,00%	318.869.000	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH (2)	Kota Batam	Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti	100,00%	131,558,000	-
1	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Batam	Jumlah ASN Yang Memenuhi Penilaian Kinerja	5.500 orang	237.513.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Batam	Jumlah ASN Yang Memenuhi Penilaian Kinerja	5.500 orang	74 354 000	-
			Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Diselesaikan	77,83%	81.356.000			Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Diselesaikan	77,83%	57,204,000	-
a	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Batam	Jumlah rekomendasi (Perwako) penilaian kinerja ASN	1 Perwako	35.000.000	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	0	-

Rencana Kerja Tahun 2023



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Batam	Persentase ASN yang membuat PKP	99,60%	74.400.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	0	
c	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Batam	Jumlah laporan monitoring evaluasi penilaian kinerja ASN	1 laporan	43.113.000	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 laporan	44,878,000	
d	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kota Batam	Jumlah pegawai yang menerima penghargaan	10 orang	30.000.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kota Batam	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	10 orang	29,476,000	
e	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Kota Batam	Jumlah ASN yang menerima Tanda Jasa	600 orang	55.000.000	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Kota Batam	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	600 orang	0	
f	Pembinaan Disiplin ASN	Kota Batam	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan disiplin	55 orang	46.356.000	Pembinaan Disiplin ASN	Kota Batam	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	55 orang	57,204,000	
g	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Batam	Jumlah penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	15 kasus	35.000.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	15 Laporan	0	
IV.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH (3)	Kota Batam	Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan DIV/S1 Ke Atas	72,76%	1.312.000.000	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH (3)	Kota Batam	Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan DIV/S1 Ke Atas	72,76%	600,593,000	-
1	Pengembangan Kompetensi ASN	Kota Batam	Jumlah ASN Berkualifikasi D-IV/S1	3.817 orang	0	Pengembangan Kompetensi ASN	Kota Batam	Jumlah ASN Berkualifikasi D-IV/S1	3.817 orang	0	-
			Jumlah ASN Berkualifikasi S-2	388 orang	212.000.000			Jumlah ASN Berkualifikasi S-2	388 orang	212.000.000	-
			Jumlah ASN Yang Memenuhi Kompetensi	2.790 orang	1.100.000.000			Jumlah ASN Yang Memenuhi Kompetensi	2.790 orang	388,593,000	-
a	Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Kota Batam	Jumlah ASN yang mengikuti pemetaan	800 Orang	400.000.000	Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Kota Batam	Jumlah ASN yang mengikuti pemetaan	800 Orang	388,593,000	
b	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kota Batam	Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar	5 Orang	212.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kota Batam	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 Orang	212.000.000	
c	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Kota Batam	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Diklat ASN	20 Orang/Kali	200.000.000	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2 Dokumen	0	

Rencana Kerja Tahun 2023



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
d	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kota Batam	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi jabatan fungsional	100 Orang	500.000.000	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kota Batam	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	0 Orang	0	
V	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kota Batam	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	65,59%	5.755.102.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kota Batam	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	65,59%	5,523,251,500	-
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Kota Batam	Persentase ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis Dan Fungsional	12,00%	620.160.000	Pengembangan Kompetensi Teknis	Kota Batam	Persentase ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis Dan Fungsional	12,00%	1,282,415,500	-
a	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Batam	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	150 Orang	620.160.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Batam	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	532 Orang	1,282,415,500	-
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kota Batam	Persentase ASN Yang Memenuhi Syarat Kualifikasi Jabatan	49,66%	1.780.000.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kota Batam	Persentase ASN Yang Memenuhi Syarat Kualifikasi Jabatan	49,66%	4,240,836,000	-
			Persentase Pemenuhan Diklatsar CPNS	100,00%	3.354.942.000			Persentase Pemenuhan Diklatsar CPNS	100,00%		-
a	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Batam	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat PIM	54 orang	1.780.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan	4,240,836,000	-
			Jumlah ASN yang mengikuti Latsar CPNS	325 orang	3.354.942.000						
JUMLAH					23.351.962.085	JUMLAH					21,944,000,963



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam mempunyai tugas di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang bersentuhan langsung dengan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam merupakan program dan kegiatan yang difokuskan pada pelayanan Kepegawaian dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia. Usulan masyarakat yang terangkum dalam RKPD Kota Batam tahun 2023 menjelaskan tidak adanya usulan masyarakat yang masuk dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2023. Untuk lebih jelasnya mengenai Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat terhadap Rencana Kerja tahun 2023 dapat dilihat pada **tabel T-C.32** berikut:

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kota Batam Tahun 2023

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RKPD Tahun 2023 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur beserta pagu anggaran yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/ pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Kepmendagri tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya akan sangat mendukung proses penyelenggaraan:

1. Perencanaan pembangunan daerah;
2. Perencanaan anggaran daerah;
3. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
4. Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
5. Pertanggungjawaban keuangan daerah;
6. Pengawasan keuangan daerah; dan
7. Analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Dengan adanya standarisasi penamaan, pemberian kode, pengelompokan informasi menuju *single codebase*, maka akan menjadikan tata kelola pemerintah daerah semakin transparan,



accountable, responsible, serta *reliable* sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Adapun tujuan penggolongan/ pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* melalui penerapan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 adalah untuk:

1. Menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
2. Melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah;
3. Membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah;
4. Mendukung penyelenggaraan sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
5. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah;
6. Mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Implementasi atas Kepmendagri dimaksud dituangkan dalam Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). SIPD digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan daerah. SIPD berfungsi mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan yang telah disusun secara sistematis sebagai acuan pemerintah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan nasional dalam bidang aparatur disusun dalam rangka membangun birokrasi yang berdaya saing global. Daya saing tersebut berfokus pada peningkatan kualitas ASN khususnya pada peningkatan kompetensi ASN dan manajemen ASN berbasis sistem merit. ASN sebagai motor penyelenggara roda pemerintahan, pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan dibutuhkan kompetensi yang sesuai. Salah satu upaya peningkatan kompetensi dimaksud adalah dengan pengembangan sumber daya ASN melalui pendidikan dan pelatihan.

Selain itu, pengembangan kompetensi ASN juga merupakan bagian penting dalam reformasi birokrasi yang berperan pada pembangunan bangsa secara berkesinambungan. Upaya pengembangan kompetensi ASN sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah mewajibkan seluruh ASN mengikuti pengembangan kompetensi minimum 20 jam pelajaran per tahun. Hal ini berarti setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang



sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi ASN yang bersangkutan.

3.2. Tema, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kota Batam dalam RKPD Tahun 2023.

Tema Pembangunan Kota Batam tahun 2023 yaitu “Pemantapan Infrastruktur Perkotaan untuk Meningkatkan Akselerasi dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Daerah”. Adapun Visi Walikota dan Wakil Walikota Batam yaitu :

***“Terwujudnya Batam Sebagai bandar Dunia Madani
Yang Modern dan Sejahtera”.***

Sedangkan Prioritas Pembangunan Kota Batam tahun 2023 yaitu :

1. Percepatan pemulihan dan pemerataan pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat berkeadilan di mainland dan hinterland.
2. Pembangunan infrastruktur, utilitas perkotaan dan sarana transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan di mainland dan hinterland.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan bermartabat di mainland dan hinterland.
4. Peningkatan dan fasilitasi investasi berbasis maritim dan keunggulan wilayah.
5. Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam masuk pada prioritas pembangunan yang ke-5 yaitu “Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat” dengan fokus pada pemberian sanksi dan penghargaan terhadap kinerja aparatur serta peningkatan disiplin, kualitas kerja, dan kompetensi aparatur pelayanan publik melalui pendidikan dan pelatihan. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas dilaksanakan melalui Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.



3.3. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.

3.3.1. Tujuan.

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi.

Tujuan bersifat lebih konkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa yang akan datang. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik berdasarkan atas visi dan misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam adalah :

“Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara”

dengan indikator tujuan :

“Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara”

Penjelasan dari tujuan dan indikator tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam tersebut dapat memberikan pemahaman sebagai berikut :

- 1) **Meningkatkan** adalah suatu keinginan untuk menaikkan kemampuan yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara.
- 2) **Profesionalitas**, mengandung pengertian kualitas sikap anggota suatu profesi serta derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk dapat melakukan tugas-pekerjaan sesuai standar dan persyaratan yang ditentukan.
- 3) **Aparatur Sipil Negara** yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah yang melaksanakan lembaga ketatalaksanaan yang mempunyai tanggungjawab dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam melayani masyarakat.
- 4) **Indeks**, adalah suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu variabel atau sekumpulan variabel yang



berhubungan satu sama lain, baik pada waktu atau tempat yang sama atau berlainan.

3.3.2. Sasaran.

Untuk mewujudkan tujuan “Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara” yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam, maka terdapat 3 (tiga) Sasaran yang akan mendukung untuk pencapaian tujuan jangka menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

- 1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian.
Pencapaian sasaran ini ditandai dengan indikator “Persentase Penyelesaian Pelayanan Informasi Kepegawaian”.
- 2) Meningkatnya Kinerja dan Kedisiplinan ASN dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan.
Pencapaian sasaran ini ditandai dengan indikator “Persentase Peningkatan Kinerja dan Disiplin ASN”.
- 3) Meningkatnya Kapasitas, Kompetensi, dan Kapabilitas ASN dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan.
Pencapaian sasaran ini ditandai dengan indikator “Persentase ASN yang Memenuhi Kualifikasi dan Kompetensi ASN”.

3.4. Program dan Kegiatan.

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis, yang diwujudkan dalam beberapa kegiatan yang terbagi lagi menjadi beberapa sub kegiatan. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2023 berupa program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah program yang menjadi kewenangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bagi Perangkat Daerah lain, meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan



pelatihan. Untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam masuk pada kewenangan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Program ini disusun untuk meningkatkan semangat pengabdian yang berorientasi pada aspek pelayanan, pengayoman, pengembangan partisipasi masyarakat dan meningkatkan pengetahuan keahlian yang berkesinambungan dan membentuk kepribadian PNS dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan :

b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Sub kegiatan ini dilaksanakan agar tersedianya gaji dan tunjangan ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam selama 1 tahun. Pada sub kegiatan ini terdiri dari belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan PNS serta tambahan tunjangan penghasilan PNS. Dengan adanya sub kegiatan ini akan meningkat semangat pengabdian untuk menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

Sub Kegiatan ini merupakan penyediaan belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan (pembantu bendahara pengeluaran dan pengurus barang), pejabat pengadaan barang/jasa dan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor benda pos (materai) selama 1 tahun.

2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah terdiri dari sub kegiatan :

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

Sub kegiatan ini merupakan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya untuk ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam.

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah “Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya”.



- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
Sub kegiatan ini merupakan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam, sehingga dengan adanya sub kegiatan ini akan meningkatkan kompetensi dan kinerja ASN khususnya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah “Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi”.
 - c. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
Sub kegiatan ini merupakan kegiatan sosialisai peraturan perundang-undangan untuk pegawai BKPSDM Kota Batam agar lebih mamahami dan mengerti aturan-aturan terutama aturan yang berkaitan dengan kepegawaian, sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan :
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
Sub kegiatan ini adalah merupakan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik yaitu penyediaan baterai untuk keperluan kantor selama 1 tahun.
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Sub kegiatan ini terdiri dari belanja operasi (belanja barang dan jasa) serta belanja modal (belanja modal peralatan dan mesin). Dengan terlaksananya kegiatan ini akan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
Sub kegiatan ini merupakan belanja penyediaan peralatan rumah tangga yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah “Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga”.



- d. Penyediaan bahan Logistik Kantor.
Sub kegiatan ini terdiri dari belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta belanja bahan bakar dan pelumas kendaraan bermotor.
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
Sub kegiatan ini adalah untuk penyediaan barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor selama 1 tahun.
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
Sub kegiatan ini adalah untuk kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun seperti koran/majalah dan buku.
 - g. Penyediaan Bahan/Material.
Sub kegiatan ini untuk kegiatan penyediaan bahan/material untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksanaan perangkat daerah dengan indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah "Jumlah penyediaan bahan/material".
 - h. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
Sub kegiatan ini untuk penyediaan belanja konsumsi untuk kunjungan tamu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam dengan indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah "Jumlah fasilitasi kunjungan tamu".
 - i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Sub kegiatan ini adalah untuk perjalanan dinas untuk pegawai BKPSDM dalam rangka menunjang penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD ke dalam maupun ke luar daerah.
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
Sub kegiatan ini merupakan pengadaan barang milik daerah berupa belanja modal.
 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
Sub kegiatan ini merupakan penyediaan jasa surat menyurat berupa pengiriman berkas atau dokumen untuk keperluan kantor.



- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
Sub kegiatan ini adalah penyediaan jasa tenaga pelayanan umum kantor seperti tenaga honorarium kontrak.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
Sub kegiatan ini merupakan penyediaan untuk jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan untuk mobil kepala badan selama 1 (satu) tahun.
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan.
Sub kegiatan ini merupakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan untuk kendaraan dinas sebanyak 4 unit selama 1 (satu) tahun.
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
Sub kegiatan ini merupakan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya untuk keperluan kantor selama 1 (satu) berupa pemeliharaan komputer, printer, laptop, acces door, dan lain-lain.

II. Program Kepegawaian Daerah.

Program Kepegawaian daerah adalah merupakan program melaksanakan administrasi kepegawaian daerah pada prinsipnya terdiri dari; penyiapan peraturan daerah di bidang kebijaksanaan teknis kepegawaian, kemudian penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, penetapan gaji, tunjangan, kesejahteraan dan pemberhentian PNS Daerah serta pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah dan menyampaikan setiap informasi kepegawaian daerah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal ini Walikota. Semua fungsi tersebut harus sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Materi yang boleh diatur hanya mengenai kebijaksanaan teknis kepegawaian daerah, sehingga tidak akan terjadi perbedaan dalam menetapkan norma, standar dan prosedur kepegawaian yang pada akhirnya dapat diciptakan kualitas



PNS yang seragam di seluruh Indonesia. Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan:

6. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN.

Sub kegiatan ini merupakan penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN, baik itu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Sehingga dengan terlaksananya sub kegiatan ini akan terpenuhinya kebutuhan ASN pada Pemerintah Kota Batam.

b. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK.

Sub kegiatan ini merupakan koordinasi dan fasilitasi terhadap pengadaan PNS dan PPPK ke pemerintah pusat baik ke Kementerian PAN dan RB, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara.

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah “Jumlah laporan koordinasi pengadaan PNS dan PPPK”.

c. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian.

Sub kegiatan ini merupakan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian bagi pegawai yang memasuki usia pensiun. Indikator kinerja dari sub kegiatan adalah “Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian”.

d. Fasilitasi Profesi Lembaga ASN.

Sub kegiatan ini merupakan fasilitasi profesi ASN terhadap beberapa lembaga seperti TASPEN, BKN, BPJS, DIRJEN PAJAK, TAPERA, KEMENDAGRI, KORPRI, KEMENPAN RB, BPS, dengan adanya fasilitasi terhadap lembaga-lembaga tersebut maka akan memperlancar terhadap pelayanan administrasi kepegawaian ASN Pemerintah Kota Batam.

e. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian.

Sub kegiatan ini merupakan pengelolaan aplikasi SIMPEG yang ada pada BKPSDM Kota Batam, berupa kegiatan pengembangan aplikasi terhadap fitur-fitur aplikasi secara mandiri maupun mendatangkan tenaga ahli dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan aplikasi tersebut.



7. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan Mutasi ASN.

Sub kegiatan ini merupakan pengelolaan mutasi ASN terhadap jabatan struktural, fungsional dan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Kebijakan mutasi jabatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi atau kebutuhan pelayanan publik. Profesionalisme dalam tugas dan tanggungjawab menjadi pegangan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, dengan berkoordinasi dengan Baperjakat dalam merumuskan dan mempertimbangkan pelaksanaan mutasi jabatan di lingkup Pemerintah Kota Batam.
 - b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN.

Sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk melayani Aparatur Sipil Negara dalam mengurus kenaikan pangkat, ujian dinas dan penyesuaian ijazah.
 - c. Pengelolaan Promosi ASN.

Sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pejabat yang mengalami promosi jabatan, diantaranya yaitu salah satunya untuk pengelolaan promosi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
8. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan *Assessment Center*.

Assessment bisa diartikan sebagai suatu proses pengumpulan informasi mengenai seseorang yang mencakup kualitas dan kuantitasnya. *Assessment* sebenarnya dibutuhkan untuk membuat keputusan karena kegiatan *Assessment* dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Selain itu, *Assessment* juga penting dilakukan guna menunjang keputusan-keputusan seperti penyaringan & diagnosis, evaluasi & intervensi, dan juga riset.

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah “Jumlah ASN yang mengikuti pemetaan kompetensi”.
 - b. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN.

Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Batam



- terutama dalam hal peningkatan kualifikasi pendidikan dengan melalui pengiriman tugas belajar bagi ASN.
- c. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat.
Sub kegiatan ini merupakan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat pada berbagai lembaga penyelenggara yang terakreditasi baik pada lembaga maupun kementerian.
Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah “Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Diklat ASN”.
 - d. Fasilitasi Pengembangan Karier dalam Jabatan Fungsional.
Sub kegiatan ini adalah Fasilitasi Pengembangan Karier dalam Jabatan Fungsional untuk pejabat fungsional dalam pengembangan kompetensi.
Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah “Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi jabatan fungsional”.
9. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
Sub Kegiatan ini merumuskan rekomendasi berupa Peraturan Walikota Batam mengenai kebijakan yang terkait penilaian dan evaluasi kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah “Jumlah rekomendasi (Perwako) penilaian kinerja ASN”.
 - b. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
Sub kegiatan ini adalah untuk mengukur Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan indikator sub kegiatan yaitu “Persentase ASN yang membuat PKP”
 - c. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
Sub kegiatan ini merupakan monitoring evaluasi terhadap penilaian kinerja ASN Pemerintah Kota Batam.
 - d. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai.
Sub kegiatan ini merupakan pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai yang disiplin, berprestasi dan berkinerja baik serta berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN yang profesional.
 - e. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai.



Pada Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, mengatur Syarat khusus bagi seorang PNS untuk memperoleh Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya adalah PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, UUD RI 1945, Negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah “Jumlah ASN yang menerima tanda jasa”.

f. Pembinaan Disiplin ASN.

Sub kegiatan ini merupakan pembinaan terhadap para ASN yang mengalami berbagai permasalahan kepegawaian dan rumah tangga, sehingga dengan adanya sub kegiatan ini ASN akan diarahkan untuk lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab agar adanya peningkatan kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui tugas pokok dan fungsinya.

g. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN.

Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN dilaksanakan dalam rangka membantu ASN dalam menyelesaikan kasus yang sedang dihadapi. Beberapa contoh kasus ASN yang memerlukan pendampingan dan pembinaan diantaranya indiscipliner aparatur, penyalahgunaan narkoba, permasalahan keluarga (perceraian, perselingkuhan), dan lain-lain. Dengan adanya pendampingan (konseling) dan pembinaan diharapkan kasus-kasus yang dihadapi ASN akan dapat terselesaikan dengan baik.

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah “Jumlah penyelesaian pelanggaran disiplin ASN”.



III. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Reformasi birokrasi pada pemerintahan pada gilirannya akan berdampak pada tuntutan kualifikasi atau kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam lembaga pemerintah. Dalam hal ini, pengembangan sumber daya manusia aparatur di sektor pemerintahan pada masa kini dan pada masa yang akan datang harus diarahkan kepada penataan kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya. Peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) aparatur dapat dilakukan melalui pengembangan standar kompetensi tersebut. Oleh karena itu segala kemampuan pemerintah saat itu harus diarahkan kepada upaya-upaya yang sistematis dan terencana untuk mencoba membangun standar kompetensi yang profesional. Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan:

1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.

Sub kegiatan ini merupakan penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi baik untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional maupun melalui pengiriman peserta Diklat keluar daerah.

2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

Sub kegiatan ini merupakan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk Eselon II, sertifikasi untuk pejabat fungsional yang akan menduduki Jabatan Fungsional, Diklat Kepemimpinan baik untuk Eselon II, III, dan IV, dan Prajabatan bagi CPNS yang telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS.



Tabel T-C.33.

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kota Batam**

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				21,944,000,963				23.154.329.085
5	BIDANG URUSAN : KEPEGAWAIAN				16,420,749,463				17.389.227.085
5	03								
5	03 01								
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	100,00%	14,115,567,463	APBD Kota	-	100 %	13.859.144.085
5	03 01 2.02								
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	Kota Batam	100,00%	12,452,100,731	APBD Kota	-	100 %	11.748.401.085
5	3 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	52 Orang/Bulan	12,399,960,731	APBD Kota	-	52 Orang/Bulan	11.717.651.085
5	3 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	1 Dokumen	52,140,000	APBD Kota	-	1 Dokumen	30.750.000
5	03 01 2.05								
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana	Kota Batam	100,00%	39,325,000	APBD Kota	-	100 %	350.125.000
5	03 1 2.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam	1 Paket	39,325,000	APBD Kota	-	0	0

Rencana Kerja Tahun 2023



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 03 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Batam	0 orang	0	APBD Kota	-	20 orang	225.000.000
5 03 1 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Batam	0 orang	0	APBD Kota	-	100 orang	125.125.000
5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	100,00%	629,267,700	APBD Kota	-	100 %	851.999.000
5 03 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	3,490,000	APBD Kota	-	1 Paket	6.081.000
5 03 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	3 Paket	184,462,700	APBD Kota	-	50 Paket	200.383.000
5 03 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	0	APBD Kota	-	-	0
5 03 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam	2 Paket	6,573,000	APBD Kota	-	12 Paket	5.998.000
5 03 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	58,554,000	APBD Kota	-	8 Paket	69.337.000
5 03 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Batam	2 Dokumen	7.200.000	APBD Kota	-	2 Dokumen	7.200.000
5 03 1 2.06 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Batam		0	APBD Kota	-	5 Paket	0
5 03 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Batam	1 Laporan	9.000.000	APBD Kota	-	12 Laporan	45.000.000
5 03 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	1 Laporan	359,988,000	APBD Kota	-	12 Laporan	518.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	Kota Batam	100,00%	679,088,000	APBD Kota	-	100 %	580.000.000
5 03 01 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam	66 Unit	679,088,000	APBD Kota	-	20 Unit	580.000.000
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	100,00%	97,046,032	APBD Kota	-	100 %	94.499.000
5 03 01 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Batam	12 Laporan	10.800.000	APBD Kota	-	12 Laporan	7.200.000
5 03 01 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam	2 Laporan	86,246,032	APBD Kota	-	2 Laporan	87.299.000
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	Kota Batam	100,00%	218,740,000	APBD Kota	-	100 %	234.120.000
5 03 01 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Batam	1 unit	39.780.000	APBD Kota	-	1 unit	39.780.000
5 03 01 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Batam	4 unit	140.100.000	APBD Kota	-	4 unit	140.100.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 03 01 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Batam	57 unit	38,860,000	APBD Kota	-	75 unit	54.240.000
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH (1)	Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN	Kota Batam	91,35%	2,305,182,000	APBD Kota	-	91.95 %	1.914.214.000
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ASN Yang Telah Memutakhirkan Data Kepegawaian	Kota Batam	86,50%	930,025,000	APBD Kota	-	87.50 %	1.347.062.000
5 03 02 2.01 2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Batam	10 Dokumen	793,106,000	APBD Kota	-	1 Dokumen	994.711.000
5 03 02 2.01 3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Batam	15 Dokumen	0	APBD Kota	-	1 Dokumen	70.000.000
5 03 02 2.01 6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Batam	116 Dokumen	0	APBD Kota	-	1 Dokumen	35.000.000
5 03 02 2.01 8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	Kota Batam	9 lembaga	0	APBD Kota	-	9 lembaga	115.000.000
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Batam	1 Dokumen	136,919,000	APBD Kota	-	1 Dokumen	132.351.000
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan Kompetensinya	Kota Batam	96,20%	643,006,000	APBD Kota	-	96.40 %	567.152.000
5 03 02 2.02 1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kota Batam	1 Dokumen	46,360,000	APBD Kota	-	4 Dokumen	75.000.000

Rencana Kerja Tahun 2023



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 03 02 2.02 2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Batam	2 Dokumen	149,993,000	APBD Kota	-	2 Dokumen	192.152.000
5 03 02 2.02 3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kota Batam	1 Dokumen	446,653,000	APBD Kota	-	1 Dokumen	300.000.000
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH (2)	Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti	Kota Batam	100,00%	131,558,000	APBD Kota	-	100 %	303.869.000
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN Yang Memenuhi Penilaian Kinerja	Kota Batam	5.500 orang	74,354,000	APBD Kota	-	5500 orang	222.513.000
		Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Diselesaikan	Kota Batam	77,83%	57,204,000			79.33 %	81.356.000
5 03 02 2.04 1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Batam	1 Dokumen	0	APBD Kota	-	1 Dokumen	0
5 03 02 2.04 2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Batam	1 Dokumen	0	APBD Kota	-	1 Dokumen	74.400.000
5 03 02 2.04 3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Batam	1 laporan	44,878,000	APBD Kota	-	1 laporan	43.113.000
5 03 02 2.04 4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kota Batam	10 orang	29,476,000	APBD Kota	-	15 orang	50.000.000
5 03 02 2.04 5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Kota Batam	600 orang	0	APBD Kota	-	600 orang	55.000.000
5 03 02 2.04 7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan disiplin	Kota Batam	55 orang	57,204,000	APBD Kota	-	55 orang	46.356.000
5 03 02 2.04 8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Batam	15 Laporan	0	APBD Kota	-	15 Laporan	35.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH (3)	Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan DIV/S1 Ke Atas	Kota Batam	72,76%	600,593,000	APBD Kota	-	72.90 %	1.312.000.000
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN Berkualifikasi D-IV/S1	Kota Batam	3.817 orang	0	APBD Kota	-	3822 orang	0
		Jumlah ASN Berkualifikasi S-2		388 orang	212.000.000			391 orang	212.000.000
		Jumlah ASN Yang Memenuhi Kompetensi		2.790 orang	388,593,000			2944 orang	1.100.000.000
5 03 02 2.03 2	Pengelolaan <i>Assessment Center</i>	Jumlah ASN yang Mengikuti Pemetaan	Kota Batam	800 Orang	388,593,000	APBD Kota	-	800 Orang	400.000.000
5 03 02 2.03 4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kota Batam	5 Orang	212.000.000	APBD Kota	-	5 Orang	212.000.000
5 03 02 2.03 5	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Kota Batam	2 Dokumen	0	APBD Kota	-	1 Dokumen	200.000.000
5 03 02 2.03 14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Kota Batam	0 Orang	0	APBD Kota	-	100 Orang	500.000.000
5 04	BIDANG URUSAN : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		Kota Batam	-	5,523,251,500	APBD Kota	-	-	5.765.102.000
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	Kota Batam	65,59%	5,523,251,500	APBD Kota	-	69.21 %	5.765.102.000
5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis Dan Fungsional	Kota Batam	12,00%	1,282,415,500	APBD Kota	-	13.00 %	630.160.000

Rencana Kerja Tahun 2023



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	04	02	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kota Batam	532 Orang	1,282,415,500	APBD Kota	-	150 Orang	630.160.000
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN Yang Memenuhi Syarat Kualifikasi Jabatan	Kota Batam	49,66 %	4,240,836,000	APBD Kota	-	54.28 %	1.780.000.000
						Persentase Pemenuhan Diklatsar CPNS		100 %				100 %	3.354.942.000
5	04	02	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Batam	2 Laporan	4,240,836,000	APBD Kota	-	1 Laporan	5.134.942.000,00



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

9.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel T-C.33. tentang Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.



Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	3				KEPEGAWAIAN						16,420,749,463			
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						14,115,567,463			
5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12,452,100,731			
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi		100 %	52 Orang/ bulan	100%	12,399,960,731	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi		100 %	1 Dokumen	100 %	52,140,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						39,325,000			
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana		100 %	1 Paket	100 %	39,325,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							Catatan Penting		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
5	3	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							629,267,700			
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	1 Paket	100 %	3,490,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	3 Paket	100 %	184,462,700	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	2 Paket	100 %	6,573,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	1 Paket	100 %	58,554,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
5 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	2 Dokumen	100 %	7,200,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5 03 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	1 Laporan	100 %	9,000,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	1 Laporan	100 %	359,988,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5 3 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								679,088,000		
5 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan		100 %	66 Unit	100 %	679,088,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							Catatan Penting
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
5 3 1 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							97,046,032			
5 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1 Laporan	100 %	10,800,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1 Laporan	100 %	86,246,032	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		
5 3 1 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							218,740,000			
5 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana		100 %	1 Unit	100 %	39,780,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
5 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana		100 %	4 Unit	100 %	140,100,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana		100 %	57 Unit	100 %	38,860,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					2,305,182,000					
5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					930,025,000					
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan DIV/S1 Ke Atas Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatar ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase Pemutakhira n Data ASN Dan Data Penempatan ASN		72.62 % 100 % 91.35 %	10 Dokumen	91.35 %	793,106,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan DIV/S1 Ke Atas Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN		72.62 % 100 % 91.35 %	1 Dokumen	91.35 %	136,919,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5 3 2 2.02	Mutasi dan Promosi ASN								643,006,000		
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN		91.35 % 93.15 %	1 Dokumen	91.35 %	46,360,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN		91.35 % 93.15 %	2 Dokumen	91.35 %	149,993,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Persentase Pemutakhiran Data ASN Dan Data Penempatan ASN		91.35 % 93.15 %	1 Dokumen	91.35 %	446,653,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
5	3	2	2.03	Pengembangan Kompetensi ASN					600,593,000						
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan D- IV/S-1 Ke Atas Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan DIV/S1 Ke Atas	Jumlah ASN yang Mengikuti Pemetaan	Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan D-IV/S-1 Ke Atas		73.17 % 72.76 %	800 Orang	72.76 %	388,593,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan D- IV/S-1 Ke Atas Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan DIV/S1 Ke Atas	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan D-IV/S-1 Ke Atas		73.17 % 72.76 %	5 Orang	72.76 %	212,000,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5	3	2	2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					131,558,000						
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti		100 %	1 Laporan	100 %	44,878,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti		100 %	10 Orang	100 %	29,476,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Persentase Kasus Disiplin ASN Yang Ditindaklanjuti		100 %	55 Orang	100 %	57,204,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5 4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								5,523,251,500		
5 4 2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								5,523,251,500		
5 4 2 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis								1,282,415,500		
5 04 02 2.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya		76.45 % 65.59 %	532 Orang	65.59 %	1,282,415,500	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
5	4	2	2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						4,240,836,000					
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikasi Sesuai Dengan Jabatan Dan Kompetensinya		76.45 % 65.59 %	2 Laporan	66.59 %	4,240,836,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
TOTAL											21,944,000,963				



Tabel 4.2. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
5	03					KEPEGAWAIAN			16,420,749,463.00	Batam		
5	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14,115,567,463.00	Batam		
5	03	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12,452,100,731.00	Batam		
5	03	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/ bulan	12,399,960,731.00	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	03	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	52,140,000.00	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5	03	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana		39,325,000.00	Batam		
5	03	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	39,325,000.00	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5	03	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		629,267,700.00			



Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	03	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,490,000.00	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	03	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	184,462,700.00	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5	03	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	6,573,000.00	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5	03	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	58,554,000.00	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5	03	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	7,200,000.00	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5	03	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	9,000,000.00	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5	03	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	359,988,000.00	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	03	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		679,088,000.00	Batam		
5	03	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	66 Unit	679,088,000.00	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	03	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		97,046,032.00	Batam	
5	03	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10,800,000.00	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	03	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	86,246,032.00	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	03	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana		218,740,000.00	Batam	
5	03	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39,780,000.00	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	03	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	140,100,000.00	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5	03	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 Unit	38,860,000.00	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5	03	02				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
5	03	02	2	01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			930,025,000.00	Batam		
5	03	02	2	01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	10 Dokumen	793,106,000.00	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Pelaksanaan Penerimaan PPPK- Penyerahan SK PPPK			793,106,000.00			
5	03	02	2	01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	136,919,000.00	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Sosialisasi Tentang Simpeg dan Informasi Kepegawaian			136,919,000.00			
5	03	02	2	02		Mutasi dan Promosi ASN			643,006,000.00	Batam		
5	03	02	2	02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	46,360,000.00	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Pelaksanaan kegiatan mutasi dan pelantikan			46,360,000.00			



Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	03	02	2	02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	149,993,000.00	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Kenaikan pangkat ASN - Ujian Kedinasan I, II dan Ujian Penyesuaian Ijazah			149,993,000.00			
5	03	02	2	02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	446,653,000.00	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Seleksi JPT Pratama - Uji Kompetensi, Evaluasi Kinerja ASN			446,653,000.00			
5	03	02	2	03		Pengembangan Kompetensi ASN			600,593,000.00	Batam		
5	03	02	2	03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang Mengikuti Pemetaan	800 Orang	388,593,000.00	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Pemetaan kompetensi pegawai eselon IV/ setara ke bawah			388,593,000.00			
5	03	02	2	03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 Orang	212,000,000.00	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Pembiayaan tugas belajar			212,000,000.00			
5	03	02	2	04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			131,558,000.00	Batam		
5	03	02	2	04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	44,878,000.00	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Penilaian dan Evaluasi SKP dan Sosialisasi Permenpan No.6 tahun 2022			44,878,000.00			
5	03	02	2	04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	10 Orang	29,476,000.00	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- Pemberian Satyalencana			29,476,000.00			



Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	03	02	2	04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	55 Orang	57,204,000.00	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- <i>Konseling Kepegawaian, Pembinaan, Pemrosesan Pelanggaran Disiplin ANS</i>			57,204,000.00			
5	04					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			5,523,251,500.00			
5	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			5,523,251,500.00			
5	04	02	2	01		Pengembangan Kompetensi Teknis			1,282,415,500.00	Batam		
5	04	02	2	01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	532 Orang	1,282,415,500.00	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- <i>Pelaksanaan ujian kompetensi PBJ</i> - <i>Pembiayaan diklat teknis dan fungsional</i>			1,282,415,500.00			
5	04	02	2	02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			4,240,836,000.00	Batam		
5	04	02	2	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan	4,240,836,000.00	Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						- <i>Diklat PIM</i> - <i>Latsar CPNS</i>			4,240,836,000.00			



9.2. Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Kota Batam

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2023 dan Prioritas Pembangunan Kota Batam tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Batam periode 2021-2026, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam berkedudukan sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan tidak secara langsung mendukung prioritas Kota Batam dalam kaitan pencapaian Program Prioritas Kota Batam dimaksud.

9.3. Prioritas Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian di atas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2023, adalah sebagaimana tabel berikut :



Tabel 4.3. Prioritas Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2023

	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Dana	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6.00	7	8
I. Pemberian sanksi dan penghargaan terhadap kinerja aparatur.	Program Kepegawaian Daerah				1,061,583,000.00	Kota Batam	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ASN Yang Telah Memutakhirkan Data Kepegawaian	91,35%	930,025,000.00	Kota Batam	
		Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN Yang Memenuhi Penilaian Kinerja	5.500 orang	131,558,000.00	Kota Batam	
			Persentase Kasus ASN Yang Diselesaikan	77,83%		Kota Batam	
II. Peningkatan disiplin, kualitas kerja, dan kompetensi aparatur pelayanan publik melalui pendidikan dan pelatihan.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				5,523,251,500.00	Kota Batam	
		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis Dan Fungsional	12,00%	1,282,415,500.00	Kota Batam	
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN Yang Memenuhi Syarat Kualifikasi Jabatan	49,66%	4,240,836,000.00	Kota Batam	
			Persentase Pemenuhan Diklatsar CPNS	100,00%		Kota Batam	
	Program Kepegawaian Daerah				600,593,000.00	Kota Batam	
		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN Berkualifikasi D-IV/S-1	3.817 orang	600,593,000.00	Kota Batam	
			Jumlah ASN Berkualifikasi S-2	388 orang			
Jumlah ASN Yang Memenuhi Kompetensi			2.790 orang				
Total Pagu Dana				7,185,427,500.00			



Dengan terlaksananya kegiatan prioritas tersebut diharapkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam dapat mewujudkan aparatur pemerintah yang handal, profesional, bermoral dan modern yang selaras dengan Visi Kota Batam yaitu “Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera”, dengan tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Melanjutkan Pembangunan Menuju Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera”. Sedangkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam termasuk pada Prioritas Pembangunan yaitu “Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat” dengan Fokus “Pemberian Sanksi dan Penghargaan Terhadap Kinerja Aparatur serta Peningkatan Disiplin, Kualitas Kerja, Dan Kompetensi Aparatur Pelayanan Publik Melalui Pendidikan dan Pelatihan”. Hal ini terwujud dengan adanya “Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia”.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kaidah Pelaksanaan.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam tahun 2023 baik dalam lingkup program maupun kegiatan serta sub kegiatan;
- b. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk;
- c. Melaksanakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
- d. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- e. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023;
- f. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya untuk arah yang lebih baik lagi.



5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi *stake holder* yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya.